

## ABSTRAK

### ANALISIS TERHADAP UPAYA PENYELENDUPAN HUKUM DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN KETENTUAN MINIMAL PEMEGANG SAHAM

Pendirian Perseroan Terbatas dalam praktek terdapat suatu perseroan yang seolah-olah didirikan oleh dua orang, sehingga sah memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setelah dibuat akta pendirian, ternyata diikuti dengan pembuatan akta pengikatan saham, akta kuasa yang memberikan hak kepada pemodal untuk menjual saham, menghadiri rapat/RUPS, menerima deviden. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi penyelundupan hukum dalam proses pendirian perseroan terbatas berkaitan ketentuan minimal pemegang saham ? (2) Bagaimana keabsahan pendirian perseroan terbatas yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah hukum berkaitan ketentuan minimal pemegang saham ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif yang didukung oleh data empiris. Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: (1) Alasan terjadinya penyelundupan hukum dalam proses pendirian perseroan terbatas berkaitan ketentuan minimal pemegang saham dalam praktek banyak dilakukan. Di satu sisi bentuk usaha yang paling diminati adalah perseroan terbatas, namun di sisi lain untuk mendirikan suatu perseroan terbatas perlu ada orang lain sebagai pemegang saham. Para pemilik modal akan berusaha untuk mencari orang yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pemegang saham meskipun hanya untuk atas nama saja. Atas dasar pemikiran yang demikian, dalam praktek timbul perseroan terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih, namun sebenarnya hanya didirikan oleh satu orang saja. (2) Keabsahan pendirian perseroan terbatas yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah hukum berkaitan ketentuan minimal pemegang saham: dari aspek formalitas : tetap sah karena memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari aspek materiil, pendirian PT tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan adanya akta pengikatan saham dan kuasa, sehingga keabsahannya sebagai badan hukum diragukan.

**Kata Kunci : *Penyelundupan Hukum, Proses Pendirian Perseroan Terbatas Minimal Saham.***

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF EFFORT SMUGGLING LEGAL PROCESS CONDITIONS RELATING TO THE ESTABLISHMENT OF A COMPANY LIMITED MINIMUM OF SHAREHOLDERS**

Establishment of a Limited Liability Company in practice there is a company that seems founded by two people, so legitimately qualify the provisions of Article 7 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. Having made the deed of incorporation, was followed by the binding of stock deed, deed of power which entitles investors to sell shares, attending meetings / GMS, receive dividends. Problems in this study were: (1) Why the smuggling law in the process of establishment of a limited liability company related minimum requirements shareholders? (2) How is the validity of the establishment of a limited liability company that is done by exploiting legal loopholes related to the minimum requirements of shareholders?

The approach used in the writing of this law is a normative juridical supported by empirical data. In this thesis research specifications used descriptive analytical data were analyzed using qualitative methods of normative analysis.

Based on the results of research and discussion can be drawn a conclusion as follows: (1) The reason for the smuggling law in the process of establishment of a limited liability company related minimum requirement of shareholders in practice many do. On the one hand, the most desirable form of business is a limited liability company, but on the other hand to establish a limited liability company need to have someone else as a shareholder. The owners of capital will try to find someone who can be used as one of the shareholders even though just for the name alone. On the basis of such thoughts, in practice arise limited liability company established by two or more people, but actually only founded by one person alone. (2) The validity of the establishment of a limited liability company that is done by exploiting legal loopholes related to the minimum requirements of shareholders: from the aspect of formality: it remains valid because it meets the provisions of Article 7 Paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. From the aspect of material, the establishment of PT does not qualify as a company founded by two (2) or more persons under their binding deed stock and power, so that its validity as a legal entity in doubt.

Keywords: Smuggling Law, Limited Liability Company Incorporation Process Minimum Shares.